

Melihat Politik Luar Negeri Capres

Beberapa hari yang lalu, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden serta menyerahkan visi dan misi mereka kepada KPU RI. Visi dan misi Jokowi-JK berjumlah 41 halaman sedangkan Prabowo-Hatta lebih tipis, berjumlah 9 halaman. Dari sekian banyak penekanan dalam visi dan misi tersebut, bidang politik luar negeri mungkin tidak terlalu sering dibicarakan banyak orang. Prabowo-Hatta hanya menuliskan poin besar gambaran pelaksanaan politik luar negeri mereka kedepan, sedangkan Jokowi-JK menuliskan dengan detil prioritas dalam beberapa poin terpisah tentang politik luar negeri mereka.

Prabowo-Hatta menempatkan politik luar negeri sebagai bagian dari salah satu dari tiga misi mereka "mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman, dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45." Sedangkan Jokowi-JK menempatkan politik luar negeri sebagai upaya menciptakan kedaulatan politik dengan "membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global." Walaupun kedua pasangan calon menggunakan bahasa dan penekanan yang berbeda, ada kesamaan maksud dan tujuan bila kita membaca dan memahami penjabaran dari poin-poin tersebut. Selain sama-sama bersifat normatif, tampaknya tidak adanya perubahan cara pandang kedua pasangan calon tentang politik luar negeri dengan pemerintahan SBY saat ini. Kedepannya, implementasinya lah yang akan membedakan keberhasilan politik luar negeri mereka.

Dalam suatu artikel yang ditulis oleh Aleksius Jemadu "Why Better Economic Diplomacy Is Crucial for Indonesia" di *the Jakarta Globe*, diplomasi ekonomi yang lebih baik merupakan suatu keharusan bagi pemimpin Indonesia mendatang. Pada dasarnya Indonesia tidak bisa menghindari ikatan dengan negara-negara asing karena Indonesia memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan. Namun, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan keuntungan nasional dalam hubungan tersebut melalui perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi lainnya tanpa harus menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan yang berlebihan membuat kerosokan *bargaining* politik luar negeri Indonesia.

Kedua pasangan calon memberikan perhatian untuk politik luar negeri yang berdimensi ekonomi nasional. Prabowo-Hatta membahasakan ini dengan "tegas melindungi kepentingan nasional" sedangkan Jokowi-JK membahasakan ini dengan "mengembangkan kerjasama yang seimbang dan relevan". Selain kebutuhan domestik ini, diplomasi yang berkaitan dengan masalah keamanan dan keselamatan warga Indonesia di negara-negara lain juga mendapatkan perhatian dari kedua pasangan calon. Walau Prabowo telah mengkampanyekan perlindungan TKI jauh hari sebelum resmi menjadi calon presiden, Jokowi-JK tampak tidak mengesampingkan isu yang satu ini.

Pada tataran kawasan Asia Tenggara, Indonesia dituntut merespon secara efektif sengketa batas negaranya dengan

negara-negara tetangga dan menjamin stabilitas regional terkait konflik Laut Tiongkok Selatan antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Rivalitas Tiongkok dan AS merupakan rahasia umum bagi dinamika politik Asia Tenggara karena kedua negara besar tersebut menjadikan Asia Tenggara sebagai halaman belakang kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Agresifitas Tiongkok dalam mengklaim kepemilikan dan eksplorasi di gugusan pulau di Laut Tiongkok Selatan akhir-akhir ini yang berujung pada memburuknya hubungan Vietnam-Tiongkok, dan kebersinambungan strategi militer AS di Filipina menjadi catatan penting bagi presiden mendatang. Sebagai negara besar, Indonesia tidak hanya dituntut menjaga keutuhan teritorialnya tapi juga dituntut menjadi *regional power* dan *leading actor* dalam integrasi ASEAN yang akan dimulai 2015 nanti sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan stabilitas politik-keamanan kawasan.

Prabowo-Hatta menekankan pada "pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif" untuk memasuki wilayah isu tersebut dengan memposisikan Indonesia berada diantara kedua *great power* tersebut. Sedangkan Jokowi-JK menekankan pada "diplomasi beridentitas negara kepulauan" dan "membangun kerjasama Internasional". Dalam upaya menjaga kedaulatan negara dan menjaga stabilitas kawasan, kedua pasangan calon menekankan pada perlunya "pengorbanan minimal" kepentingan nasional semaksimal mungkin. Agak terkesan berat memang, memperjuangkan kepentingan nasional dan mengupayakan kepentingan regional secara bersamaan. Untuk kawasan Indo-Pasifik, Jokowi-JK menjabarkan panjang lebar kebijakan Indonesia lima tahun mendatang untuk mengintegrasikan dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri.

Pada tataran Internasional yang lebih luas, kedua pasangan calon nampaknya memiliki pemikiran yang sama tentang perlunya memposisikan Indonesia sebagai kekuatan *middle power* yang berpengaruh dalam politik global. Prabowo-Hatta menekankan pada upaya meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Sedangkan Jokowi-JK menjelaskan peran politik Indonesia dalam kerjasama dan institusi Internasional seperti ASEAN, OKI, G20, IMF, PBB dan lainnya yang bertujuan mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan.

Kedua pasangan calon boleh saja memiliki gagasan hebat perihal masa depan politik luar negeri Indonesia. Namun, mengesampingkan realitas kapabilitas dan kerawanan nasional Indonesia saat ini hanya akan menjadikan gagasan tersebut sekedar karya tulis. Realitas politik internasional yang kompleks dan *national interest-oriented* antar negara akan membatasi politik luar negeri Indonesia. Untuk mewujudkan politik luar negeri dari gagasan besar tentu harus dilakukan secara bertahap dan dimulai dari hal yang paling realistis. Di samping itu, konstelasi politik global menunjukkan bahwa

negara-bangsa yang politik luar negerinya relatif kuat dipastikan memiliki ekonomi dan militer yang relatif kuat pula. Bila pemimpin Indonesia kedepan konsisten untuk mencita-citakan politik luar negeri yang berdaulat dan bermartabat, pastikanlah negara ini memiliki ekonomi domestik dan kapabilitas militer yang kuat.*